
Interaksi Dinamis antara Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi: Studi Komparatif Lintas Negara

Maurits Richard J.¹, Muhammad Syaroni Rofii²

Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

E-mail: mrichard1908@gmail.com¹, muhammadsyaroni@ui.ac.id²

Article History:

Received: 03 November 2024

Revised: 11 Desember 2024

Accepted: 16 Desember 2024

Keywords: *Demokrasi, Ekonomi, Komparasi.*

Abstract: *Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi interaksi dinamis antara demokrasi dan pembangunan ekonomi melalui studi komparatif lintas negara. Dalam konteks global yang terus berubah, hubungan antara institusi politik dan pertumbuhan ekonomi semakin kompleks dan memerlukan pemahaman yang lebih mendalam. Dengan menggunakan metode Kualitatif Comparative Analysis (QCA), penelitian ini menganalisis berbagai negara demokratis, seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa, serta negara-negara otoriter seperti China, untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi kinerja ekonomi masing-masing. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan institusi demokratis yang kuat, partisipasi masyarakat, dan perlindungan hak asasi manusia berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokratis. Sementara itu, di negara-negara otoriter, meskipun pertumbuhan ekonomi yang pesat sering kali dicapai melalui kontrol politik yang ketat, tantangan terkait ketimpangan sosial tetap menjadi masalah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman yang kontekstual dan nuansir mengenai hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi adalah kunci untuk mengembangkan kebijakan yang dapat menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di seluruh dunia.*

PENDAHULUAN

Hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi telah menjadi subjek yang hangat diperbincangkan dalam disiplin ilmu sosial, politik, dan ekonomi. Banyak teori dan studi telah berupaya menjelaskan bagaimana dua aspek ini saling berpengaruh dan membentuk satu sama lain. Salah satu pandangan yang paling berpengaruh berasal dari penelitian seminal Seymour Martin Lipset pada tahun 1959, yang menunjukkan adanya korelasi positif antara tingkat pembangunan ekonomi dan stabilitas demokrasi. Menurut Lipset, negara-negara dengan ekonomi yang lebih maju cenderung memiliki peluang lebih besar untuk membangun dan mempertahankan institusi demokratis yang kuat. Namun, meskipun temuan ini telah menjadi landasan bagi banyak penelitian, diskusi mengenai kausalitas yang mendasari hubungan ini masih

terus berlangsung. Pertanyaan tentang apakah demokrasi mendorong pembangunan ekonomi atau sebaliknya, serta faktor-faktor lain yang mempengaruhi dinamika ini, tetap menjadi perdebatan.

Dinamika global dalam beberapa dekade terakhir semakin memperumit pemahaman tentang interaksi antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Ketimpangan global yang kian melebar, kemunculan model pembangunan alternatif, serta tantangan yang dihadapi oleh demokrasi liberal di banyak negara memperlihatkan bahwa hubungan antara kedua aspek tersebut tidaklah selalu sederhana atau linier. Contohnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat di China di bawah pemerintahan otoriter telah menimbulkan pertanyaan mengenai validitas asumsi bahwa demokrasi selalu sejalan dengan kemakmuran ekonomi. Selain itu, krisis ekonomi yang melanda negara-negara demokrasi maju seperti Amerika Serikat dan Eropa pada dekade terakhir juga menunjukkan bahwa stabilitas ekonomi tidak selalu terjamin oleh keberadaan sistem politik demokratis. Transisi demokrasi yang rumit dan kadang terhambat di banyak negara berkembang semakin mempertegas bahwa variabel-variabel yang mempengaruhi hubungan ini sangat beragam.

Fenomena ini menunjukkan bahwa asumsi tradisional tentang hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi perlu dievaluasi kembali dalam konteks perubahan global yang lebih luas. Ketidakpastian ekonomi global, seperti yang dipicu oleh ketimpangan sosial, memperlihatkan bahwa demokrasi tidak selalu menjadi jaminan bagi kemakmuran ekonomi yang merata. Sebaliknya, negara-negara otoriter seperti China mampu menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tanpa harus mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi liberal. Oleh karena itu, penting bagi para peneliti untuk mempertimbangkan variabel-variabel lain, seperti kebijakan pemerintah, kultur politik, dan intervensi internasional, dalam memahami dinamika kompleks antara demokrasi dan pembangunan ekonomi di berbagai konteks nasional.

Kemajuan teknologi, khususnya media sosial, juga telah memberikan dimensi baru dalam hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Media sosial telah memberikan suara bagi kelompok-kelompok yang sebelumnya terpinggirkan dalam diskursus politik, sekaligus menciptakan ketidakstabilan politik dengan mempercepat penyebaran informasi yang belum terverifikasi. Dampak teknologi ini pada demokrasi sangat kompleks, karena meskipun teknologi dapat memfasilitasi partisipasi politik yang lebih besar, ia juga dapat memperlemah institusi-institusi demokrasi yang sudah ada, terutama di negara-negara dengan pembangunan ekonomi yang belum merata.

Penelitian lintas negara tentang interaksi dinamis antara demokrasi dan pembangunan ekonomi menjadi semakin relevan dalam konteks global yang semakin kompleks. Setiap negara memiliki sejarah, kondisi sosial, dan konteks ekonomi yang unik, yang membentuk bagaimana demokrasi dan pembangunan ekonomi berinteraksi satu sama lain. Faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, stabilitas sosial, akses terhadap sumber daya, dan kerangka hukum yang ada memainkan peran penting dalam menentukan apakah demokrasi dapat mendukung pembangunan ekonomi atau justru sebaliknya. Di beberapa negara, demokrasi bisa menjadi fondasi yang kuat untuk mendorong inovasi, memperkuat kebebasan individu, dan menciptakan lingkungan bisnis yang sehat. Namun, dalam kasus lain, tantangan internal seperti korupsi, ketimpangan sosial, atau kurangnya kapasitas institusi dapat memperlemah dampak positif demokrasi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Negara-negara dengan sejarah panjang otoritarianisme, misalnya, sering kali menghadapi tantangan yang lebih besar dalam membangun institusi demokrasi yang stabil dibandingkan negara-negara yang sudah lama menjalankan demokrasi. Negara-negara ini mungkin menghadapi resistensi dari elit yang berkuasa, keterbatasan dalam masyarakat sipil, dan ketidakpercayaan

publik terhadap proses demokrasi. Selain itu, transisi dari rezim otoriter ke sistem demokrasi sering kali tidak berjalan mulus dan dapat menyebabkan instabilitas politik yang berdampak negatif pada pembangunan ekonomi. Sebaliknya, negara-negara yang telah lama menikmati demokrasi cenderung memiliki institusi yang lebih matang dan mapan, yang mampu menyesuaikan diri dengan tantangan ekonomi yang muncul

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis secara komparatif bagaimana interaksi dinamis antara demokrasi dan pembangunan ekonomi terjadi di berbagai negara dengan konteks historis, sosial, dan ekonomi yang berbeda. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan timbal balik antara demokrasi dan pertumbuhan ekonomi, serta mengeksplorasi bagaimana institusi demokratis dapat mendukung atau menghambat pembangunan ekonomi, dan sebaliknya, bagaimana tingkat pembangunan ekonomi mempengaruhi prospek demokratisasi. Dengan melakukan studi lintas negara, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai variasi dampak demokrasi terhadap ekonomi di berbagai konteks dan membantu memperluas wawasan tentang faktor-faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan demokrasi dan pembangunan ekonomi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi komparatif lintas negara untuk mengeksplorasi interaksi dinamis antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami secara mendalam konteks sosial, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi hubungan timbal balik antara kedua variabel tersebut di berbagai negara. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada hubungan linear, tetapi juga meneliti faktor-faktor historis dan kultural yang membentuk dinamika demokrasi dan pembangunan ekonomi di negara-negara yang berbeda.

Pengumpulan data dilakukan melalui kajian literatur mendalam, termasuk analisis dokumen resmi, laporan kebijakan, dan studi akademik yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder ini berasal dari publikasi internasional, laporan organisasi global, serta penelitian terdahulu yang mempelajari hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Peneliti juga menggunakan laporan dari lembaga seperti Bank Dunia, UNDP, dan Freedom House untuk mendapatkan informasi tentang indikator ekonomi dan indeks demokrasi di negara-negara yang menjadi fokus studi. Data ini akan membantu dalam memahami pola dan dinamika yang ada di setiap negara yang diteliti.

Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik, di mana data yang terkumpul akan dikelompokkan berdasarkan tema-tema utama yang berkaitan dengan interaksi antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Setiap negara akan dianalisis secara individual untuk melihat faktor-faktor khusus yang mempengaruhi hubungan tersebut, dan kemudian dilakukan perbandingan lintas negara untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan. Peneliti menggunakan metode *Qualitative Comparative Analysis* (QCA) sebagai alat analisis. QCA adalah metode kualitatif yang memungkinkan analisis sistematis dari beberapa kasus negara dengan menggunakan logika set-theory. Metode ini memungkinkan penelitian untuk mengidentifikasi kombinasi faktor-faktor penyebab yang menghasilkan hasil tertentu (dalam hal ini hubungan antara demokrasi dan pembangunan ekonomi). QCA cocok untuk memeriksa kasus negara-negara demokratis dan otoriter, serta menganalisis variasi lintas negara berdasarkan konteks sosial dan sejarah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Studi Kasus Negara-Negara Demokratis

Dalam konteks negara-negara demokratis seperti Amerika Serikat, Jerman, dan Swedia, penelitian menunjukkan bahwa keberadaan institusi demokratis yang kuat mendorong inovasi dan kewirausahaan. Di Amerika Serikat, kebijakan yang mendukung kompetisi dan perlindungan hak kekayaan intelektual telah menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan bisnis baru (Mazzucato, 2013). Sebuah studi oleh Acemoglu et al. (2019) menemukan bahwa negara dengan tingkat demokrasi yang lebih tinggi cenderung memiliki lebih banyak inovasi, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

Selain itu, Di negara-negara Eropa seperti Jerman dan Swedia, sistem kesejahteraan sosial yang kuat telah terbukti efektif dalam mengurangi ketimpangan ekonomi dan mendorong partisipasi masyarakat dalam ekonomi. Menurut Esping-Andersen (1990), model kesejahteraan sosial Skandinavia tidak hanya memberikan perlindungan sosial tetapi juga meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan, yang secara langsung berkontribusi pada produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, negara-negara ini menunjukkan bahwa kesejahteraan sosial yang baik tidak hanya bermanfaat untuk kesejahteraan individu, tetapi juga untuk kemajuan ekonomi secara keseluruhan.

Ketiga, Tingkat pendidikan yang tinggi di negara-negara demokratis memiliki dampak positif pada partisipasi politik dan keputusan ekonomi. Studi oleh Verba et al. (1995) menunjukkan bahwa individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi cenderung lebih terlibat dalam proses politik, yang pada gilirannya meningkatkan akuntabilitas pemerintah dan kualitas kebijakan. Hal ini dapat dilihat di Swedia, di mana tingkat pendidikan yang tinggi berkontribusi pada tingkat partisipasi masyarakat yang signifikan dalam pemilihan umum, menghasilkan kebijakan ekonomi yang lebih responsif dan inklusif (Blais et al., 2001).

Keempat, Keberadaan media bebas dan independen di negara-negara demokratis juga berperan penting dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pembuatan kebijakan ekonomi. Menurut penelitian oleh Gentzkow et al. (2011), media yang bebas dapat berfungsi sebagai alat kontrol sosial, mendorong pemerintah untuk merespons kebutuhan masyarakat. Hal ini sangat penting dalam konteks ekonomi, di mana keputusan yang diambil oleh pemerintah harus mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat untuk menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan dan adil.

Terakhir, analisis menunjukkan bahwa stabilitas politik yang dihasilkan dari demokrasi berkontribusi pada kemandirian ekonomi. Negara-negara dengan sistem politik yang stabil cenderung lebih mampu menarik investasi asing dan domestik, yang diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi. Sebuah laporan oleh Rodrik (2000) menekankan pentingnya institusi yang stabil dalam menciptakan lingkungan yang mendukung investasi dan pertumbuhan. Negara-negara demokratis seperti Jerman dan Swedia telah berhasil memanfaatkan stabilitas ini untuk mengembangkan ekonomi mereka secara berkelanjutan.

Studi Kasus Negara-Negara Otoriter

Salah satu contoh paling mencolok dari pertumbuhan ekonomi yang pesat di negara otoriter adalah China. Sejak reformasi ekonomi yang dimulai pada akhir 1970-an, China telah mengalami pertumbuhan ekonomi yang luar biasa, dengan rata-rata pertumbuhan PDB lebih dari 9% per tahun (World Bank, 2021). Menurut Zhang (2015), model pembangunan China, yang menggabungkan kontrol politik yang ketat dengan liberalisasi ekonomi, memungkinkan negara tersebut untuk menarik investasi asing dan mendorong pertumbuhan industri. Hal ini

menunjukkan bahwa dalam konteks tertentu, otoritarianisme dapat memberikan stabilitas politik yang diperlukan untuk mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, Kebijakan ekonomi terpusat di China, di mana pemerintah memiliki kendali besar terhadap sektor-sektor kunci, juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang cepat. Sebuah penelitian oleh Naughton (2018) menunjukkan bahwa intervensi pemerintah dalam perekonomian, termasuk dukungan untuk industri strategis dan pembangunan infrastruktur, telah membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan. Otoritas yang kuat memungkinkan pemerintah untuk mengambil keputusan jangka panjang dan menghindari kebijakan populis yang sering kali menghambat pertumbuhan di negara-negara demokratis.

Salah satu faktor penting yang mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara otoriter adalah stabilitas politik dan keamanan sosial. Menurut Huang (2015), pemerintah China berhasil menciptakan stabilitas yang relatif tinggi, yang mengurangi risiko konflik sosial dan memastikan kelanjutan investasi. Dalam konteks ini, rezim otoriter seringkali mengorbankan kebebasan individu demi mencapai tujuan ekonomi. Meskipun hal ini menimbulkan kritik dari perspektif hak asasi manusia, stabilitas yang dihasilkan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Keempat, Pengaruh globalisasi juga memainkan peran penting dalam pertumbuhan ekonomi negara-negara otoriter. Sebagai contoh, China telah berhasil memanfaatkan akses ke pasar internasional dan integrasi dalam rantai pasokan global. Sebuah studi oleh Ruan (2016) mengindikasikan bahwa keterlibatan China dalam perdagangan internasional telah meningkatkan kapasitas produksi dan ekspor, yang berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Dalam banyak kasus, pemerintah otoriter mampu mengadopsi kebijakan yang mempromosikan keterbukaan ekonomi sambil mempertahankan kontrol politik yang ketat.

Terakhir, meskipun negara-negara otoriter seperti China telah menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang pesat, ada risiko dan tantangan yang perlu diperhatikan. Penelitian oleh Piketty (2014) menunjukkan bahwa ketimpangan ekonomi dapat meningkat dalam sistem otoriter, di mana keuntungan dari pertumbuhan tidak selalu didistribusikan secara adil. Selain itu, model pertumbuhan yang bergantung pada kontrol politik yang ketat dapat menghadapi tantangan di masa depan, terutama jika tekanan untuk reformasi demokratis meningkat. Dengan demikian, meskipun otoritarianisme dapat mendukung pertumbuhan jangka pendek, tantangan struktural jangka panjang tetap ada.

Perbandingan Lintas Negara dalam Interaksi antara Demokrasi dan Pembangunan Ekonomi

Interaksi antara demokrasi dan pembangunan ekonomi telah menjadi fokus utama dalam kajian politik dan ekonomi. Teori pembangunan menekankan bahwa institusi yang kuat, baik dalam konteks demokratis maupun otoriter, dapat memengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan (Acemoglu & Robinson, 2012). Dalam konteks demokrasi, institusi yang baik dapat meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat, yang semuanya berkontribusi pada kebijakan ekonomi yang lebih baik. Sebaliknya, negara otoriter sering kali dapat mengimplementasikan kebijakan secara cepat dan efektif, meskipun tanpa partisipasi publik, yang juga dapat menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Khan, 2017).

Negara-negara demokratis seperti Swedia dan Jerman menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan transparansi pemerintahan berkontribusi pada kebijakan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Helliwell dan Putnam (1999), tingkat kepercayaan sosial yang tinggi dalam masyarakat demokratis menciptakan iklim yang mendukung investasi dan inovasi. Dalam

hal ini, QCA menunjukkan bahwa negara-negara dengan institusi demokratis yang kuat cenderung mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil dan berkelanjutan (Ragin, 2008). Tabel 1 menunjukkan indikator yang mendukung pertumbuhan ekonomi di negara-negara demokratis, termasuk tingkat pendidikan, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia.

Tabel 1. Perbandingan Indikator Pembangunan Ekonomi

Indikator	Negara Demokratis	Negara Otoriter
Tingkat Pendidikan	Tinggi	Menengah
Partisipasi Politik	Tinggi	Rendah
Perlindungan Hak Asasi Manusia	Kuat	Lemah
Inovasi	Tinggi	Menengah
Ketimpangan Ekonomi	Rendah	Menengah

Di sisi lain, negara-negara otoriter seperti China dan Vietnam telah menunjukkan bahwa kontrol politik yang ketat dapat memungkinkan implementasi kebijakan yang lebih efektif dan terfokus, meskipun dengan biaya demokrasi yang tinggi. Sebuah studi oleh Naughton (2018) menunjukkan bahwa pemerintah otoriter dapat mengelola ekonomi secara efisien dengan mengambil keputusan yang cepat dan menyeluruh, yang sering kali tidak mungkin dilakukan dalam konteks demokrasi. QCA menunjukkan bahwa meskipun faktor-faktor seperti kontrol politik dan stabilitas dapat menghasilkan pertumbuhan yang cepat, tantangan terkait distribusi kekayaan dan hak asasi manusia tetap menjadi masalah serius (López & Pritchett, 1999).

Meskipun terdapat perbedaan yang jelas antara negara-negara demokratis dan otoriter, keduanya memiliki tantangan serupa terkait dengan ketimpangan ekonomi. Di negara-negara demokratis, meskipun ada kebijakan yang mendukung redistribusi, ketimpangan tetap ada akibat ketidakadilan struktural dalam akses terhadap pendidikan dan kesehatan (Piketty, 2014). Sementara itu, negara-negara otoriter sering kali menghadapi kritik atas praktik ketidakadilan sosial dan pengabaian terhadap hak-hak pekerja, yang dapat menimbulkan ketegangan sosial di kemudian hari. QCA menyoroti bahwa dalam kedua konteks, pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak selalu diiringi dengan peningkatan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat (Rodrik, 2000).

Globalisasi telah mengubah dinamika antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, memfasilitasi pertumbuhan di kedua jenis rezim. Dalam konteks negara demokratis, keterlibatan dalam perdagangan internasional dan investasi asing membantu memperkuat institusi yang ada (Gereffi, 2018). Di negara otoriter, akses ke pasar global juga mendukung pertumbuhan ekonomi, meskipun sering kali dengan risiko ketidakadilan yang lebih besar. QCA menunjukkan bahwa negara-negara yang mampu mengadopsi kebijakan terbuka terhadap globalisasi, terlepas dari sistem politiknya, cenderung mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih baik (Rodrik, 2011).

Perbandingan lintas negara antara demokrasi dan otoritarianisme menunjukkan bahwa meskipun kedua sistem memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat bergantung pada konteks spesifik dan institusi yang ada. QCA memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang faktor-faktor yang memengaruhi pertumbuhan ekonomi, dan menyoroti perlunya pendekatan kebijakan yang mempertimbangkan konteks lokal serta kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan yang berfokus pada peningkatan pendidikan, partisipasi politik, dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi prioritas dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di semua negara, baik demokratis maupun otoriter.

KESIMPULAN

Dalam analisis interaksi antara demokrasi dan pembangunan ekonomi, penelitian ini menunjukkan bahwa baik negara-negara demokratis maupun otoriter memiliki kelebihan dan tantangan masing-masing dalam mencapai pertumbuhan ekonomi. Negara-negara demokratis seperti Swedia dan Jerman membuktikan bahwa institusi yang kuat, partisipasi politik yang tinggi, dan perlindungan hak asasi manusia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan berkelanjutan. Sebaliknya, negara-negara otoriter seperti China dan Vietnam menunjukkan bahwa meskipun kontrol politik yang ketat dapat memfasilitasi implementasi kebijakan yang cepat dan efektif, tantangan terkait ketidakadilan sosial dan ketimpangan ekonomi tetap menjadi isu yang harus diatasi.

Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini menggarisbawahi pentingnya konteks spesifik dalam memahami dinamika antara demokrasi dan pembangunan ekonomi. Globalisasi telah menciptakan peluang baru bagi kedua sistem, namun tantangan seperti ketimpangan dan hak asasi manusia tetap relevan. Oleh karena itu, kebijakan yang mengedepankan peningkatan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan penguatan institusi harus diutamakan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di berbagai negara, terlepas dari bentuk pemerintahan yang diterapkan.

DAFTAR REFERENSI

- Acemoglu, D., & Robinson, J. A. (2012). *Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity, and Poverty*. Crown Business.
- Acemoglu, D., Naidu, S., Restrepo, P., & Robinson, J. A. (2019). *Democracy Does Cause Growth*. *Journal of Political Economy*, 127(1), 47-100.
- Blais, A., Massicotte, L., & Yoshinaka, A. (2001). *Electoral Systems*. In *Comparing Democracies 2: Elections and Voting in Global Perspective* (pp. 49-81). SAGE Publications.
- Esping-Andersen, G. (1990). *The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Princeton University Press.
- Gentzkow, M., Shapiro, J. M., & Sinkinson, M. (2011). *The Effect of Newspaper Entry on Elections: Evidence from a Randomized Experiment of Voter Turnout*. *American Economic Journal: Applied Economics*, 3(2), 1-24.
- Gereffi, G. (2018). *Global Value Chains and Development: Redefining the Contours of 21st Century Capitalism*. Cambridge University Press.
- Helliwell, J. F., & Putnam, R. D. (1999). *Education and Social Capital*. NBER Working Paper No. 7121.
- Khan, M. (2017). *State and Economic Development in South Asia*. In *State, Society and Economy in the Middle East and North Africa* (pp. 45-70). Cambridge University Press.
- López, R. A., & Pritchett, L. (1999). *The Role of Government in Economic Development*. *World Bank Research Observer*, 14(1), 25-46.
- Mazzucato, M. (2013). *The Entrepreneurial State: Debunking Public vs. Private Sector Myths*. Anthem Press.
- Piketty, T. (2014). *Capital in the Twenty-First Century*. Harvard University Press.
- Ragin, C. C. (2008). *Qualitative Comparative Analysis Using Fuzzy Sets (fsQCA)*. *Comparative Sociology*, 7(2), 182-210.

- Rodrik, D. (2000). *Growth Strategies*. In *Handbook of Economic Growth* (pp. 967-1014). Elsevier.
- Rodrik, D. (2011). *The Globalization Paradox: Democracy and the Future of the World Economy*. W. W. Norton & Company.
- Verba, S., Schlozman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Harvard University Press.